
Efektivitas Pembangunan Balai Serbaguna di Setiap Desa Kota Prabumulih

Effectiveness of Building Multipurpose Halls in Every Village in Prabumulih City

Diandes Khaidir¹⁾, Raniasa Putra²⁾ & Novita Wulandari¹⁾*

1) Prodi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana, Universitas Tamansiswa Palembang, Indonesia

2) Universitas Sriwijaya, Indonesia

*Corresponding Email: wulanrhendhu@gmail.com

Abstrak

Artikel atau tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Pembangunan Balai Serbaguna di Setiap Desa Kota Prabumulih, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Pembangunan Balai Serbaguna di Setiap Desa Kota Prabumulih. Data-data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumen. Informan penelitian berjumlah 17 orang, dipilih melalui purposive sampling berdasarkan kriteria relevan seperti keterlibatan langsung, pengetahuan, dan variasi demografis. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan balai serbaguna di Kota Prabumulih efektif, karena berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pengembangan desa. Pembangunan ini melibatkan masyarakat, memanfaatkan dana secara efisien, dan menyediakan fasilitas berkualitas. Fleksibilitas ruang dan rencana penyewaan gedung sebagai sumber pendapatan tambahan adalah langkah strategis positif. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan signifikan dalam penggunaan gedung serbaguna, dengan pembatasan sosial mempengaruhi jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan. Meskipun kapasitas gedung memungkinkan penyesuaian protokol kesehatan, tantangan seperti penurunan pendapatan dan kebutuhan peningkatan kapasitas perlu diatasi.

Kata kunci : Efektivitas; Pembangunan; dan Desa

Abstract

This article or writing aims to describe and analyze the effectiveness of the construction of multipurpose halls in each village of Prabumulih City, as well as analyzing the factors that influence the effectiveness of the construction of multipurpose halls in each village of Prabumulih City. Data was collected through interviews, observations and documents. There were 17 research informants, selected through purposive sampling based on relevant criteria such as direct involvement, knowledge, and demographic variations. Data analysis uses the Miles and Huberman interactive model. The research results show that the construction of a multi-purpose hall in Prabumulih City is effective, because it has succeeded in improving the quality of life of the community and supporting village development. This development involves the community, utilizes funds efficiently, and provides quality facilities. Space flexibility and building rental plans as additional sources of income are positive strategic steps. The COVID-19 pandemic has caused significant changes in the use of mixed-use buildings, with social impacts influencing the types of activities that can take place. While building capacity allows for adjustments to health protocols, challenges such as reduced revenue and the need for increased capacity need to be addressed.

Key words: Effectiveness; Development; and Village

How to Cite: Khaidir, D. Putra, R. & Wulandari, N. (2019). Efektivitas Pembangunan Balai Serbaguna di Setiap Desa Kota Prabumulih. *Journal of Law & Policy Review*. 1 (2): 278-286.



PENDAHULUAN

Pembangunan desa di Indonesia merupakan prioritas nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Norsanti, 2021). Salah satu inisiatif penting dalam konteks ini adalah pembangunan balai serbaguna, yang dirancang sebagai fasilitas multifungsi untuk mendukung kegiatan masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya (Imanuddin & Saraan, 2019; Kusmanto, 2013). Infrastruktur ini diharapkan memperkuat kapasitas desa dalam merespons kebutuhan lokal dan mendukung pemberdayaan masyarakat. Keterkaitan ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dan melaksanakan proyek sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal (Pohan & Hidayani, 2020).

Balai serbaguna merupakan wujud nyata dari upaya pemerintah dalam memberikan fasilitas yang dapat mendukung berbagai aktivitas masyarakat (Lubis, 2020). Dalam balai serbaguna, warga dapat menyelenggarakan kegiatan pendidikan seperti kursus dan pelatihan, mengadakan layanan kesehatan seperti posyandu, serta melaksanakan kegiatan sosial seperti rapat warga dan pertemuan komunitas (Sumarno et al., 2022). Keberadaan balai serbaguna diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan kohesi sosial di tingkat desa, sekaligus menjadi pusat kegiatan yang produktif bagi seluruh lapisan masyarakat (Nugraha, 2022).

Namun, meskipun memiliki tujuan yang mulia, pelaksanaan proyek balai serbaguna di berbagai daerah di Indonesia sering menghadapi tantangan signifikan. Keterbatasan dana merupakan salah satu hambatan utama (Saragih et al., 2019). Banyak desa yang tidak memiliki anggaran yang cukup untuk membangun dan memelihara balai serbaguna dengan standar yang memadai (Hakim & Pakam, 2014). Selain itu, koordinasi yang kurang optimal antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat sering kali mengakibatkan keterlambatan atau bahkan kegagalan dalam pelaksanaan proyek. Rendahnya partisipasi masyarakat juga menjadi masalah serius, dimana masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, sehingga balai serbaguna yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka (Purba & Djamin, 2015).

Misalnya, di beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Sumatera, meskipun banyak proyek balai serbaguna telah dilaksanakan, hasilnya sering kali tidak memenuhi standar yang diharapkan dalam hal kualitas dan pemanfaatan (Singestecia et al., 2018). Banyak balai serbaguna yang dibangun dengan kualitas konstruksi yang buruk, sehingga cepat mengalami kerusakan (N. Halawa et al., 2019). Selain itu, pemanfaatan balai serbaguna sering kali rendah karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat atau kurangnya program-program yang mendukung pemanfaatannya. Hal ini mengakibatkan banyak balai serbaguna yang terbengkalai dan tidak memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat (Batubara, 2013).

Evaluasi efektivitas pembangunan balai serbaguna dapat diukur melalui beberapa kriteria utama seperti kesesuaian dengan rencana, penggunaan dana, partisipasi masyarakat, dan kualitas fasilitas (Kurniawan et al., 2016). Kesesuaian dengan rencana mencakup desain, spesifikasi teknis, jadwal, dan anggaran. Penggunaan dana menilai efisiensi pengelolaan anggaran serta pencapaian tujuan yang ditetapkan (Ameliya & Husna, 2022). Partisipasi masyarakat mengukur keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan proyek (Manshur, 2012). Kualitas fasilitas menilai aspek fisik dan fungsional untuk memastikan standar yang diharapkan dan penggunaan jangka panjang. Evaluasi ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pembangunan balai serbaguna (Andika & Tarigan, 2013; Ginting et al., 2020).

Teori yang mendasari evaluasi efektivitas ini melibatkan pendekatan pembangunan desa yang menekankan peran penting partisipasi masyarakat dan perencanaan berbasis kebutuhan (D. K. Halawa & Batubara, 2022). Teori ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 menyoroti prioritas penggunaan Dana

Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penerapan teori ini dalam praktik dapat dilihat dari proyek balai serbaguna yang melibatkan masyarakat dalam setiap tahap dan memastikan transparansi penggunaan dana.

Pada tahun 2020, Kota Prabumulih melaksanakan dua proyek pembangunan balai serbaguna. Proyek ini menampilkan partisipasi aktif masyarakat, penggunaan dana yang efisien, dan hasil yang memuaskan. Partisipasi masyarakat dalam proyek ini terlihat dari berbagai tahap pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan fasilitas. Penggunaan dana yang efisien juga tercermin dari penyelesaian proyek sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Hasil yang memuaskan dapat dilihat dari kualitas konstruksi balai serbaguna dan tingginya tingkat pemanfaatan oleh masyarakat.

Sebagai perbandingan, proyek pada tahun 2019 lebih fokus pada rehabilitasi balai serbaguna yang ada, bukan pembangunan baru. Ini menunjukkan pergeseran dalam prioritas pembangunan. Rehabilitasi balai serbaguna yang ada bertujuan untuk memperbaiki fasilitas yang sudah ada agar dapat digunakan kembali dengan optimal. Selain itu, beberapa proyek yang dimulai pada 2018 tetapi belum selesai dilanjutkan pada 2020, mencerminkan dinamika lokal yang mempengaruhi proyek tersebut. Proyek-proyek ini menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dana dan koordinasi yang kurang optimal, namun berhasil diselesaikan dengan partisipasi aktif masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Efektivitas pembangunan balai serbaguna di setiap desa Kota Prabumulih serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sesuai dengan Sugiyono (Kurniawan et al., 2016), dilakukan dalam kondisi alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Metode ini bersifat deskriptif, menekankan proses daripada hasil, menggunakan analisis data induktif, dan menekankan makna.

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder dengan 17 informan sebagai subjek penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan di lokasi balai serbaguna menggunakan catatan lapangan, kamera, dan alat rekam suara. Wawancara semi-terstruktur menggunakan panduan pertanyaan terbuka dan alat rekam suara, sedangkan studi dokumentasi melibatkan pengumpulan dokumen terkait seperti laporan proyek dan anggaran.

Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga langkah (Beong, 2018): reduksi data, display data, dan pengambilan kesimpulan. Reduksi data melibatkan seleksi dan penyederhanaan informasi penting. Data disajikan dalam bentuk matriks, grafik, dan tabel untuk memudahkan interpretasi, diikuti dengan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang ditampilkan.

Metode ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena pembangunan balai serbaguna. Proses induktif membantu mengungkap makna dari data yang dikumpulkan. Melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, peneliti dapat mengevaluasi kesesuaian rencana, efisiensi penggunaan dana, partisipasi masyarakat, dan kualitas fasilitas. Model interaktif Miles dan Huberman memungkinkan peneliti secara sistematis mengorganisasi dan menganalisis data, memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas pembangunan balai serbaguna, dan menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas Pembangunan Balai Serbaguna di Setiap Desa Kota Prabumulih

Pembangunan balai serbaguna di setiap desa di Kota Prabumulih merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pengembangan desa.

Proyek ini tidak hanya mencakup penciptaan infrastruktur fisik, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, efisiensi penggunaan dana, dan hasil akhir yang dicapai. Untuk menilai efektivitas dari proyek ini, kita perlu melihat beberapa aspek utama: partisipasi masyarakat, penggunaan dana, hasil akhir, serta kepatuhan terhadap regulasi.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa. Menurut undang-undang ini, masyarakat harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pembangunan agar hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. Pembangunan balai serbaguna di Kota Prabumulih merupakan contoh konkret penerapan prinsip ini. Proyek ini melibatkan masyarakat dari awal hingga akhir pelaksanaan, mulai dari perencanaan hingga pemanfaatan fasilitas.

Pada akhir tahun 2020, Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi forum utama untuk menentukan prioritas dan kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa 2021. Musyawarah ini melibatkan berbagai unsur, termasuk pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat. Daftar kegiatan yang disusun dalam APB Desa 2021 mencerminkan prioritas yang disepakati dalam musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa proyek balai serbaguna merupakan hasil dari proses musyawarah yang transparan dan partisipatif, yang mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Penggunaan dana merupakan faktor kunci dalam menilai efektivitas pembangunan balai serbaguna. Proyek ini menunjukkan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Pada tahun 2020, Kota Prabumulih melaksanakan dua proyek pembangunan balai serbaguna yang berhasil diselesaikan sesuai anggaran yang ditetapkan. Hasilnya adalah fasilitas yang berkualitas tinggi dengan tingkat pemanfaatan yang memuaskan.

Efisiensi penggunaan dana juga terlihat dari bagaimana proyek ini mempengaruhi perekonomian lokal. Pembangunan balai serbaguna tidak hanya menciptakan infrastruktur tetapi juga membuka lapangan kerja tambahan. Misalnya, tenaga kebersihan yang dipekerjakan untuk menjaga kebersihan fasilitas dibiayai dari Anggaran Dana Desa (ADD). Ini adalah contoh nyata bagaimana proyek infrastruktur dapat berdampak positif pada perekonomian lokal dan mendukung kemandirian desa.

Keberadaan balai serbaguna telah memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat desa. Sebelumnya, pemerintah desa sering meminjam gedung sekolah untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan. Dengan adanya balai serbaguna, desa kini memiliki fasilitas yang dapat digunakan secara mandiri untuk berbagai acara, termasuk pertemuan perangkat desa, pertemuan warga, musyawarah, kegiatan olahraga, dan pembelajaran. Terutama dalam konteks pandemi COVID-19, balai serbaguna dapat diadaptasi untuk memenuhi protokol kesehatan, menunjukkan fleksibilitas penggunaan fasilitas.

Selain itu, pemerintah desa berencana untuk menjadikan balai serbaguna sebagai sumber pendapatan tambahan dengan menyewakannya kepada masyarakat. Ini merupakan langkah strategis untuk menambah pendapatan desa, yang sebelumnya bergantung pada sumber daya alam. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pendapatan desa tetapi juga memanfaatkan fasilitas yang telah dibangun secara optimal.

Meskipun manfaat dari pembangunan balai serbaguna sangat signifikan, penting untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa selalu sesuai dengan regulasi yang berlaku. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk proyek balai serbaguna memerlukan izin khusus sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015. Proses ini memastikan bahwa meskipun proyek tersebut tidak termasuk dalam prioritas utama, penggunaannya dapat dibiayai dengan Dana Desa jika memenuhi prosedur perizinan dan kesesuaian dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), dan APB Desa.

Sebagai contoh, pembangunan balai desa Adipasir menunjukkan bagaimana meskipun proyek tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, persetujuan dari Walikota

Prabumulih telah menghindari sanksi administratif. Ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan regulasi dan pentingnya mendapatkan persetujuan yang tepat untuk memastikan penggunaan Dana Desa yang efektif. Persetujuan semacam ini juga mencerminkan komitmen pemerintah kota dalam mendukung proyek yang bermanfaat bagi masyarakat meskipun tidak sepenuhnya sesuai dengan prioritas awal.

Fleksibilitas ruang adalah faktor penting dalam efektivitas balai serbaguna. Desain balai serbaguna harus mempertimbangkan berbagai jenis kegiatan yang akan dilakukan di dalamnya. Ruang utama gedung harus dirancang untuk berbagai kegiatan, sementara ruang lainnya harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik. Misalnya, ruang untuk pertemuan, kegiatan olahraga, dan pembelajaran harus memiliki desain yang fleksibel sehingga dapat digunakan secara optimal untuk berbagai tujuan.

Pentingnya fleksibilitas ruang adalah untuk menghindari ruang yang tidak efektif dan memastikan bahwa fasilitas tetap relevan meskipun terjadi perubahan pemakaian. Desain yang baik akan memungkinkan perubahan tata letak dan fungsi ruang tanpa mengubah struktur bangunan secara signifikan. Ini akan memastikan bahwa balai serbaguna dapat terus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Evaluasi terhadap efektivitas pembangunan balai serbaguna di Kota Prabumulih menunjukkan bahwa proyek ini telah berhasil dalam banyak aspek. Partisipasi masyarakat yang aktif, penggunaan dana yang efisien, hasil akhir yang memuaskan, dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan indikasi keberhasilan proyek. Namun, ada beberapa area yang dapat diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut.

Pertama, perlu adanya pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan balai serbaguna untuk memastikan bahwa fasilitas ini digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah desa harus melakukan survei rutin dan mendapatkan umpan balik dari pengguna fasilitas untuk mengetahui apakah ada kebutuhan tambahan atau perbaikan yang diperlukan.

Kedua, pengelolaan dan pemeliharaan balai serbaguna harus dipastikan untuk menjaga kualitas fasilitas. Ini termasuk memastikan bahwa dana untuk pemeliharaan dan perawatan fasilitas dialokasikan dengan tepat dan digunakan secara efisien.

Ketiga, perluasan rencana penggunaan fasilitas untuk mencakup kegiatan yang lebih luas dapat dipertimbangkan. Misalnya, balai serbaguna dapat digunakan untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan, seminar, dan acara komunitas lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, pembangunan balai serbaguna di Kota Prabumulih adalah contoh yang baik dari penerapan prinsip partisipasi masyarakat dan perencanaan berbasis kebutuhan dalam pembangunan desa. Proyek ini menunjukkan efektivitas penggunaan Dana Desa, keterlibatan masyarakat, dan hasil yang memuaskan. Namun, untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut, perhatian harus diberikan pada fleksibilitas ruang dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan balai serbaguna dapat terus memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa dan mendukung pengembangan desa secara berkelanjutan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemanfaatan Gedung Serbaguna

Pada tahun 2020, gedung serbaguna di Kota Prabumulih mengalami perubahan signifikan dalam hal pemanfaatan akibat pandemi COVID-19. Pandemi ini membawa tantangan dan peluang baru, mempengaruhi cara masyarakat menggunakan fasilitas ini. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan gedung serbaguna meliputi lingkungan sosial yang terdampak pandemi, kapasitas gedung, adaptasi terhadap situasi darurat, dan kebutuhan untuk peningkatan kapasitas serta pengetahuan masyarakat. Memahami faktor-faktor ini penting untuk mengevaluasi dan meningkatkan pemanfaatan gedung serbaguna dalam konteks situasi yang tidak biasa ini.

Pandemi COVID-19 mengubah banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk cara masyarakat memanfaatkan fasilitas umum seperti gedung serbaguna. Pada tahun 2020, Kota Prabumulih, seperti banyak daerah lainnya, menghadapi dampak signifikan dari pembatasan sosial dan kebijakan kesehatan yang ketat. Masyarakat diwajibkan untuk menjaga jarak sosial, mengenakan masker, dan menghindari kerumunan untuk mencegah penyebaran virus.

Lingkungan sosial yang terpengaruh oleh pandemi ini mempengaruhi cara pemanfaatan gedung serbaguna. Aktivitas yang biasanya dilaksanakan di gedung serbaguna, seperti pertemuan komunitas, perayaan, dan acara adat, mengalami penurunan yang signifikan. Pembatasan sosial dan kebijakan kesehatan menyebabkan banyak kegiatan harus dilakukan secara daring atau dalam format yang lebih kecil dan terbatas. Sebagai hasilnya, gedung serbaguna yang awalnya dirancang untuk menampung acara dengan jumlah peserta yang besar menjadi kurang optimal dalam fungsinya selama pandemi. Misalnya, pertemuan komunitas yang biasanya diadakan di gedung serbaguna harus dipindahkan ke platform virtual, mengurangi frekuensi penggunaan gedung.

Kapasitas gedung serbaguna merupakan faktor kunci dalam menentukan efektivitas pemanfaatannya. Gedung-gedung ini dirancang untuk memiliki kapasitas yang cukup besar, memungkinkan mereka untuk disewakan dan digunakan untuk berbagai jenis kegiatan, termasuk acara adat, pernikahan, dan kegiatan keagamaan. Kapasitas ini memberikan keuntungan dalam konteks pemanfaatan gedung untuk acara yang memerlukan ruang luas.

Namun, pada tahun 2020, meskipun kapasitas gedung serbaguna cukup besar dan dapat menampung berbagai jenis acara, pemanfaatannya tidak optimal karena adanya pembatasan sosial. Aktivitas yang biasanya memerlukan ruang besar, seperti pernikahan atau acara keagamaan yang melibatkan banyak tamu, harus disesuaikan dengan protokol kesehatan yang membatasi jumlah peserta. Hal ini berdampak pada jumlah acara yang dapat diselenggarakan di gedung serbaguna dan mengurangi pendapatan dari sewa gedung, yang sebelumnya menjadi salah satu sumber pendapatan desa.

Meskipun demikian, kapasitas gedung serbaguna juga memberikan keuntungan dalam situasi pandemi. Gedung yang luas memungkinkan pengaturan jarak antar peserta dalam kegiatan yang harus dilakukan secara langsung. Beberapa desa mengatur tempat duduk dengan jarak yang aman dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat selama acara. Dengan cara ini, kapasitas gedung serbaguna yang besar dapat dimanfaatkan secara lebih aman, meskipun jumlah peserta terbatas.

Menghadapi situasi pandemi, banyak desa di Kota Prabumulih harus beradaptasi dan mencari cara inovatif untuk memanfaatkan gedung serbaguna. Penggunaan gedung serbaguna untuk acara virtual atau hybrid menjadi salah satu solusi yang diterapkan. Gedung yang memiliki fasilitas teknis yang memadai dapat digunakan untuk menyelenggarakan pertemuan daring dengan peserta yang terhubung dari lokasi yang berbeda. Inovasi ini memungkinkan pemanfaatan gedung serbaguna tetap relevan meskipun dalam situasi pembatasan sosial.

Selain itu, beberapa desa mulai mempertimbangkan pemanfaatan gedung serbaguna untuk kegiatan yang mendukung ketahanan pangan atau pemberdayaan ekonomi lokal. Gedung serbaguna dapat digunakan sebagai tempat pelatihan keterampilan, bazar produk lokal, atau kegiatan lain yang mendukung ekonomi desa. Ini menunjukkan bahwa gedung serbaguna dapat berfungsi tidak hanya sebagai tempat untuk acara sosial tetapi juga sebagai pusat kegiatan yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial desa, terutama di masa-masa sulit seperti pandemi.

Contoh adaptasi lain adalah penggunaan gedung serbaguna sebagai pusat distribusi bantuan sosial atau sebagai fasilitas kesehatan tambahan. Beberapa desa mengubah fungsi gedung serbaguna untuk mendukung penanggulangan pandemi, seperti pusat vaksinasi atau tempat penyimpanan bantuan logistik. Adaptasi ini menunjukkan fleksibilitas gedung serbaguna dalam menghadapi situasi darurat dan memberikan kontribusi positif dalam konteks kesehatan masyarakat.

Meskipun ada banyak adaptasi dan inovasi, pemanfaatan gedung serbaguna di Kota Prabumulih pada tahun 2020 juga menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pembatasan anggaran dan sumber daya untuk pemeliharaan gedung serta

penyediaan fasilitas yang memadai. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan pendapatan desa dari sewa gedung, yang dapat mempengaruhi kemampuan desa untuk menjaga dan meningkatkan fasilitas gedung serbaguna.

Kendala lain adalah kebutuhan untuk peningkatan kapasitas dan pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan gedung serbaguna secara efektif selama pandemi. Pendidikan dan pelatihan mengenai protokol kesehatan, penggunaan teknologi untuk acara daring, dan manajemen ruang menjadi penting untuk memastikan bahwa gedung serbaguna dapat digunakan secara optimal dalam konteks baru ini. Misalnya, pelatihan tentang cara mengatur acara dengan jarak sosial yang memadai atau pelatihan penggunaan teknologi untuk acara virtual dapat membantu meningkatkan efektivitas pemanfaatan gedung serbaguna.

Untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan gedung serbaguna di masa depan, beberapa langkah strategis perlu diambil. Pertama, peningkatan infrastruktur teknologi menjadi krusial. Gedung serbaguna dapat dilengkapi dengan fasilitas teknis yang lebih baik, seperti sistem audio-visual yang canggih dan konektivitas internet yang stabil, untuk mendukung acara virtual dan hybrid. Penambahan fasilitas ini akan memungkinkan penggunaan gedung yang lebih fleksibel dan relevan dalam berbagai situasi, meningkatkan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam.

Selanjutnya, pengembangan program pelatihan juga sangat penting. Program ini harus ditujukan tidak hanya untuk pengelola gedung serbaguna tetapi juga untuk masyarakat umum. Pelatihan tentang protokol kesehatan, penggunaan teknologi, dan manajemen acara akan meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan gedung secara efektif, terutama dalam konteks situasi darurat atau perubahan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, diversifikasi penggunaan gedung menjadi langkah yang harus dipertimbangkan untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan sewa dari acara besar. Gedung serbaguna dapat digunakan untuk berbagai kegiatan yang mendukung ekonomi lokal, seperti pelatihan keterampilan, bazar produk lokal, dan kegiatan komunitas. Dengan cara ini, gedung tidak hanya berfungsi sebagai tempat untuk acara sosial, tetapi juga sebagai pusat kegiatan yang bermanfaat bagi pengembangan ekonomi desa.

Terakhir, perencanaan pemeliharaan yang berkelanjutan sangat penting. Mengingat penurunan pendapatan dari sewa gedung, desa perlu merencanakan anggaran pemeliharaan yang berkelanjutan untuk menjaga kualitas fasilitas. Dengan perencanaan yang baik, gedung serbaguna akan tetap dalam kondisi baik dan dapat digunakan secara optimal dalam jangka panjang. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemanfaatan gedung serbaguna dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di masa depan.

Pemanfaatan gedung serbaguna di Kota Prabumulih pada tahun 2020 menunjukkan bagaimana faktor-faktor seperti lingkungan sosial yang terdampak pandemi, kapasitas gedung, adaptasi terhadap situasi darurat, serta kendala dan tantangan mempengaruhi efektivitas penggunaan fasilitas ini. Meskipun pandemi COVID-19 menghadirkan tantangan besar, gedung serbaguna tetap memainkan peran penting dalam masyarakat dengan melakukan adaptasi dan inovasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, seperti peningkatan infrastruktur teknologi, pengembangan program pelatihan, diversifikasi penggunaan gedung, dan perencanaan pemeliharaan yang berkelanjutan, efektivitas pemanfaatan gedung serbaguna dapat terus ditingkatkan dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat di masa depan.

SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis efektivitas pembangunan balai serbaguna di Kota Prabumulih menunjukkan keberhasilan proyek dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pengembangan desa. Proyek ini berhasil melibatkan masyarakat secara aktif, memanfaatkan dana dengan efisien, dan menyediakan fasilitas berkualitas yang mendukung berbagai kegiatan. Keberadaan balai serbaguna mengurangi ketergantungan pada fasilitas sekolah

dan telah menyesuaikan dengan kebutuhan selama pandemi COVID-19. Fleksibilitas ruang dan rencana untuk menyewakan gedung sebagai sumber pendapatan tambahan adalah langkah strategis yang positif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemanfaatan gedung serbaguna di Kota Prabumulih pada tahun 2020 melibatkan dampak pandemi COVID-19 dan kapasitas gedung itu sendiri. Pandemi menyebabkan perubahan signifikan dalam penggunaan fasilitas umum, dengan pembatasan sosial mempengaruhi jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan. Meskipun kapasitas gedung menawarkan fleksibilitas untuk menyesuaikan protokol kesehatan, tantangan seperti penurunan pendapatan dan kebutuhan peningkatan kapasitas perlu diatasi. Adaptasi, seperti penggunaan untuk acara virtual dan kegiatan pemberdayaan ekonomi, menunjukkan relevansi gedung serbaguna, menjadikannya aset penting dalam pengembangan desa di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameliya, H., & Husna, C. A. (2022). Efektivitas Pengelolaan Anggaran Tahun 2021 terhadap Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1147–1157. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1406>
- Andika, M., & Tarigan, U. (2013). Evaluasi Kinerja Pemerintah Desa Bandar Tengah Kecamatan Bandar Khalifah Kabupaten Serdang Bedagai. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(2), 98–111.
- Batubara, B. M. (2013). Hubungan Komunikasi Badan Perwakilan Desa terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 76–87.
- Beong, S. dkk. (2018). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan dalam Penanggulangan Bencana Alam. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 4(2), 176–185.
- Ginting, M., Hasibuan, M. A., & Sinaga, R. S. (2020). Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Besadi Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat Tahun 2013. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 2(2), 68–78. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v2i2.335>
- Hakim, A., & Pakam. (2014). Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Publik Di Desa Tandam Hulu Ii Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 2(1), 1–20. https://www.google.com/search?safe=strict&ei=_PmXPnMJ63az7sP1ryRwA0&q=Anggraini%2C+R.+D.+%282013%29.+Transparansi%2C+Partisipasi%2C+dan+Akuntabilitas+Pengelolaan+Anggaran+Dana+BOS+Dalam+Program+RKAS+di+SDN+Pacarkeling+VIII+Surabaya.+Kebijakan+Dan+Manajem
- Halawa, D. K., & Batubara, B. M. (2022). Efektivitas Kinerja Pegawai Pada Bidang Pemberdayaan Sosial Dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Nias Barat Effectiveness Performance Of Employees In The Field Of Social Development An. *Strukturasi : Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 4(2), 138–144. <https://doi.org/10.31289/strukturasi.v4i2.1409>
- Halawa, N., Kadir, A., & Matondang, A. (2019). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 di Desa Selemak Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Political Participation of the Community in the Election of Governor and Deputy Governor of Nort. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1), 45–53.
- Imanuddin, M., & Saraan, K. (2019). Analisis Faktor Penghambat Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Perumnas Simalingkar , Pancur Batu , Kabupaten Deli Serdang Analysis of Hazarding Factors Implementation of Village Funds Allocati. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 9(2), 151–157.
- Kurniawan, B., Sembiring, P., Kusmanto, H., Tarigan, U., Aparat, P., Kurniawan, B., Sembiring, P., Kusmanto, H., Tarigan, U., Langkat, P. K., Ilmu, F., Politik, I., Utara, U. S., Ilmu, F., Politik, I., & Area, U. M. (2016). Perilaku Aparat Birokrasi dalam Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 97–106.
- Kusmanto, H. (2013). Peran Badan Permusyawaratan Daerah dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 1(1), 39–47.
- Lubis, M. F. R. (2020). Peran Akademisi dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Masyarakat (Sosialisasi Desa Bandar Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara). *Journal*



- of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(3), 658-672. <https://doi.org/10.34007/jehss.v2i3.138>
- Manshur, A. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Daerah. *Jurnal Desentralisasi*, 10(2), 163-177. <https://doi.org/10.37378/jd.2012.2.163-177>
- Norsanti, N. (2021). EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN BATUMANDI KABUPATEN BALANGAN (Studi Kasus Pada Desa Mampari dan Desa Banua Hanyar). *Jurnal Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 3(1), 10. <https://doi.org/10.20527/jpp.v3i1.3825>
- Nugraha, D. S. (2022). Pemberdayaan Kelompok Penggerak Pariwisata di Kabupaten Sumedang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 304-313. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1202>
- Pohan, M. N., & Hidayani, S. (2020). Tinjauan Hukum pada Tindak Pidana Melakukan Persetubuhan Terhadap Anak Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(2), 377-385. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.313>
- Purba, I. S., & Djamin, D. (2015). Partisipasi Masyarakat dalam Meningkatkan Good Governance di Tingkat Desa. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 3(1), 25-36. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>
- Saragih, E. E., Mustamam, & Mukidi. (2019). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol 2, No.(1).
- Singestecia, R., Handoyo, E., & Isdaryanto, N. (2018). Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah di Slawi Kabupaten Tegal. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(1), 63-72. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/upsj%0APartisipasi>
- Sumarno, L., Meiji, N. H., & Apriyadi, D. W. (2022). Politik Uang dan Perubahan Pandangan Politik di Kecamatan Pagelaran Pasca Runtuhnya Orde Baru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2269-2281. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1063>